



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUATAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA WORKSHOP DAU & DAK DAERAH PERBATASAN

Pontianak, 26 Juni 2008

Yang saya hormati,

- Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas;
- Direktur Dana Perimbangan Direktorat Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan;
- Anggota DPR-RI dan Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat;
- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
- Rekan-Rekan Muspida;
- Para Bupati di Daerah Perbatasan antar negara;
- Para Kepala SKPD/Instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Hadirin sekalian yang berbahagia.

Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua.

Mengawali sambutan ini, sebagai umat beragama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan pada hari ini.

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang atas kehadiran Bapak dan ibu sekalian yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Saya berharap semoga pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan data statistik untuk perbandingan angka kemiskinan regional Kalimantan pada bulan Maret 2007, bahwa tingkat kemiskinan Kalimantan Barat berada pada posisi pertama di antara Provinsi lainnya, yaitu sebesar 12,91 % atau sejumlah 584.300 jiwa yang sebagian besar berada di perdesaan, yaitu sebesar 13,47 % atau sejumlah 440.200 jiwa dibandingkan dengan kemiskinan yang berada di perkotaan sebesar 11,45 % atau sejumlah 144.100 jiwa.

Dari 1.614 jumlah desa di Kalimantan Barat terdapat 78,7 % atau sebanyak 1.270 desa dikategorikan tertinggal. Oleh karena itu agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan secara adil dan merata serta terwujudnya masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera, maka saya membagi wilayah Provinsi Kalimantan Barat menjadi tiga wilayah pembangunan, yaitu Wilayah Perbatasan, Wilayah Pedalaman, Wilayah Pesisir dan Kepulauan. Dari ketiga wilayah tersebut akan saya fokuskan kepada pembangunan pedesaan sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal, agar menjadi desa mandiri, seperti desa mandiri pangan, desa mandiri energi.

Program membangun desa pada hakekatnya ditujukan untuk memberantas kebodohan, mengentaskan kemiskinan, menuntaskan keterbelakangan dan ketertinggalan. Program tersebut dapat terwujud apabila pembangunan pedesaan baik di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan dilaksanakan secara terintegrasi, saling mengisi, saling mendukung serta adanya kesatuan persepsi antara satu sektor dengan sektor lainnya, misalnya program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat dijadikan contoh seperti Program Desa Agropolitan atau Desa Pusat Pertumbuhan yang pembiayaannya sebagian besar oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mendukung sepenuhnya dengan memberikan *sharing* melalui dana APBD.

Oleh karena itu saya menginginkan pembangunan di kawasan pedesaan lebih fokus, sehingga setiap kabupaten/kota memiliki desa andalan, seperti desa nelayan, desa budaya, desa wisata, desa bersih, desa sehat, desa cerdas, dan lain-lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Hadirin yang saya hormati.

Berdasarkan data yang ada bahwa dari tahun ke tahun dana DAU Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan adanya peningkatan, pada tahun 2005 jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima sebesar Rp.312,57 M, pada tahun 2008 ini sebesar Rp.728,08 M. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Kalimantan Barat baru menerima pada tahun 2008 ini sebesar Rp.31,09 M. Walaupun terjadi peningkatan jumlah DAU, namun peningkatan tersebut belum signifikan dengan kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan, mengingat Kalimantan Barat memiliki kekhususan dibandingkan provinsi lainnya, seperti *Heart of Borneo* (HOB) dan termasuk dari 7 Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mohon kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan perhatian khusus, baik dalam bentuk DAU maupun DAK kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten Perbatasan dan Instansi vertikal terkait yang ada di Provinsi..

Khusus untuk pembangunan kawasan perbatasan, perlu saya informasikan bahwa sebagian besar kawasan perbatasan di Kalimantan Barat merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang sangat terbatas. Di masa lalu kawasan perbatasan dipandang sebagai wilayah yang perlu diawasi secara ketat oleh pihak keamanan. Pendekatan pembangunan masih menggunakan pendekatan keamanan. Akibatnya, di sejumlah daerah kawasan perbatasan tidak tersentuh pembangunan. Masyarakat di kawasan itu pada umumnya miskin dan lebih berorientasi ke negara tetangga. Di lain pihak, negara tetangga seperti Malaysia justru telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakatnya.

Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi, maka pendekatan pembangunan di kawasan perbatasan lebih ditekankan kepada aspek kesejahteraan yang ditunjang oleh aspek keamanan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan kepada hal-hal yang menunjang perekonomian masyarakat di perbatasan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan di kawasan itu.

Berbagai prinsip tersebut sesuai dengan perkembangan kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga. Selain itu kebijakan dan strategi tersebut ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan negara dan upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, termasuk eksploitasi yang dilakukan masyarakat. Melalui strategi itu kegiatan ekonomi dapat dilakukan lebih selektif dan optimal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia telah mempersiapkan program aksi pembangunan kawasan perbatasan (*Border Area Development*) termasuk di dalamnya program dan kegiatan yang ditangani oleh instansi vertikal di daerah.

Hadirin yang saya hormati,

Permasalahan yang cukup krusial yang kami hadapi dalam pengelolaan kawasan perbatasan adalah tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi di tingkat Pemerintah Pusat dalam menangani kawasan perbatasan. Masing-masing departemen /lembaga non departemen bersemangat untuk membangun kawasan perbatasan, tapi belum bersinergi antara satu sama lain, sehingga kondisi kawasan perbatasan sampai saat ini masih tetap tertinggal.

Dalam pembangunan kawasan perbatasan, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan makro dan kebijakan mikro. Kebijakan makro yaitu "percepatan pembangunan wilayah perbatasan di lima kawasan PKS (Pusat Kegiatan strategis Nasional), yaitu Aruk di Kabupaten Sambas, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Entikong di Kabupaten Sanggau, Jasa di kabupaten Sintang serta Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk juga daerah *hinterland*nya yang memiliki potensi komoditi untuk dikembangkan, yaitu Perkebunan, Pertambangan, Industri dan Pariwisata".

Sedangkan kebijakan mikro adalah Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan sesuai dengan Hirarkinya (Nasional, Regional, Provinsi, Kabupaten, Kawasan dan Detail) yang akan menjadi pedoman semua *stakeholders* dalam implementasi program Pembangunan Infrastruktur kewilayahan (Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Air Bersih, Energi dan Telekomunikasi serta sarana Pendidikan dan Kesehatan) keseluruhan program dan kegiatan di atas, diharapkan dapat dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilakukan secara terintegrasi dan sinergis.

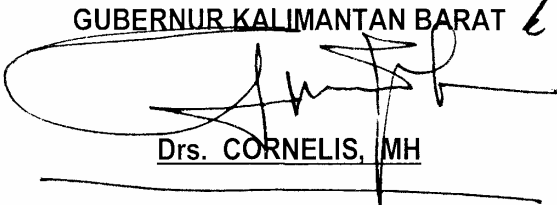
Berdasarkan kebijakan di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun rencana aksi pengembangan kawasan perbatasan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

Hadirin yang saya hormati.

Saya menyadari bahwa DAK reguler yang diterima oleh kabupaten saat ini masih relatif kecil. Oleh karena itu saya mengusulkan agar perlu penambahan dana khusus untuk kabupaten perbatasan, demikian juga dengan instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan pengelolaan perbatasan antara lain Bea Cukai, Imigrasi, Qarantina, TNI dan POLRI, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Perbatasan siap mendukung melalui dana APBD.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga pertemuan kita hari ini memperoleh manfaat yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat secara keseluruhan. Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa maka Kegiatan Workshop DAU dan DAK Daerah Perbatasan dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melindungi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT ↙

Drs. CORNELIS, MH